



Original Article

Paradoks Soft Diplomacy Amerika Serikat: Diplomasi Budaya melalui Program AMINEF Terhadap Kebijakan Imigrasi Restrikti

Winda Eka Pahla Ayuningtyas¹, Sarah Novianti², Hendika Dwinanda Wicaksana³✉, Gema Pertiwi⁴, Fitria Hani Aprina⁵, Deanda Dewindaru⁶, Marina Rospitasari⁷, Chomariyana Kartika Hesti⁸, Lailatus Sholihah⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Correspondence Author: hendikawicaksana@upnvj.ac.id✉

Abstract:

Paradox of the United States' soft diplomacy through the American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF) as a tool of cultural diplomacy amid increasingly restrictive immigration policies. While the U.S. promotes openness, multiculturalism, and international collaboration through programs such as Fulbright and the Community College Initiative, its stringent immigration policies—particularly since the Trump era and beyond the pandemic—contradict the nation's image as a defender of freedom and inclusivity. Using a qualitative, literature-based approach and critical discourse analysis, this research explores how soft diplomacy operates as a foreign policy strategy to sustain American cultural hegemony in Indonesia. The findings indicate that, despite restrictive immigration measures, AMINEF remains effective in fostering cultural diplomacy and enhancing the U.S. image in Indonesia. This paradox underscores America's attempt to balance domestic priorities (security and nationalism) with global ambitions (cultural and political influence).

Keywords: soft diplomacy, AMINEF, diplomasi budaya, kebijakan imigrasi

Pendahuluan

Amerika Serikat (AS) sejak lama dikenal sebagai salah satu negara yang paling aktif menggunakan *soft power* dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Konsep *soft power* yang diperkenalkan oleh [\(Nye, 2023\)](#) menekankan kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi pihak lain melalui daya tarik nilai, budaya, dan kebijakan, bukan melalui paksaan militer (*hard power*). Efektivitas *soft power* sangat bergantung pada sinkronisasi antara kebijakan luar negeri dan kebijakan publik domestik. Kebijakan imigrasi yang selaras dengan nilai-nilai keterbukaan dan demokrasi akan memperkuat penerimaan publik internasional terhadap program diplomasi budaya [\(Melissen, 2011\)](#) Salah satu bentuk konkret dari *soft power*



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

diplomacy ini adalah diplomasi budaya dan pendidikan, yang menjadi sarana penting dalam membangun citra positif dan memperkuat hubungan antar negara.

Dalam konteks ini, American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF) memainkan peran signifikan sebagai lembaga pelaksana program pertukaran pendidikan dan kebudayaan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Berdiri sejak tahun 1992, AMINEF merupakan pengelola utama program Fulbright di Indonesia—program beasiswa bergengsi yang dibiayai bersama oleh pemerintah AS dan Indonesia. Melalui program ini, ribuan pelajar, peneliti, dan profesional Indonesia berkesempatan untuk menempuh pendidikan di berbagai universitas di Amerika Serikat, sementara warga Amerika juga dikirim ke Indonesia untuk melakukan penelitian, mengajar, dan memahami budaya lokal. Program ini dianggap sebagai bentuk nyata diplomasi budaya yang berkontribusi pada peningkatan pemahaman lintas budaya, membangun jejaring global, dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara ([Pekudjawang, 2019](#)).

Namun, di balik citra positif diplomasi budaya tersebut, muncul sebuah paradoks yang menarik untuk dikaji. Pada saat Amerika Serikat terus mempromosikan keterbukaan, toleransi, dan kolaborasi melalui program seperti AMINEF, kebijakan domestiknya—terutama dalam bidang imigrasi—justru menunjukkan kecenderungan yang semakin restriktif dan eksklusif ([Ramage, 2002](#)). Sejak pemerintahan Donald Trump (2017–2021), AS memperketat kebijakan imigrasi melalui kebijakan *travel ban*, pembatasan visa pelajar, serta peningkatan pengawasan terhadap imigran dan pengunjung dari negara-negara berkembang. Meskipun beberapa kebijakan tersebut dilonggarkan pada masa pemerintahan Joe Biden, sentimen proteksionis dan kekhawatiran terhadap isu keamanan nasional masih kuat mempengaruhi kebijakan imigrasi AS ([Solano & Huddleston, 2022](#)).

Kondisi ini menciptakan sebuah kontradiksi atau “paradoks soft diplomacy”, di mana Amerika Serikat di satu sisi menampilkan diri sebagai promotor nilai-nilai demokrasi, kebebasan akademik, dan multikulturalisme melalui program seperti AMINEF, tetapi di sisi lain mengimplementasikan kebijakan imigrasi yang membatasi mobilitas manusia dan potensi pertukaran budaya itu sendiri. Paradoks ini mencerminkan ketegangan antara kepentingan strategis domestik dan citra internasional yang ingin dibangun melalui diplomasi lunak ([Komarayudha, 2025](#)).

Para ahli hubungan internasional menilai bahwa fenomena semacam ini merupakan bagian dari dinamika *dual-track diplomacy*—yakni diplomasi yang berlangsung secara simultan antara kebijakan resmi negara (*official diplomacy*) dan diplomasi masyarakat (*public diplomacy*). Menurut ([Cull, 2008](#)), *cultural diplomacy* seperti AMINEF sering berfungsi sebagai instrumen jangka panjang untuk membangun kepercayaan dan citra positif yang dapat mengimbangi dampak negatif dari kebijakan luar negeri atau domestik yang kontroversial. Dalam hal ini, program AMINEF dapat dipandang sebagai strategi Amerika Serikat untuk menjaga *engagement* dan citra positif di mata masyarakat Indonesia, meskipun kebijakan imigrasinya secara global menimbulkan kritik.

Upaya ini menjadi semakin signifikan ketika dihadapkan pada kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang bersifat restriktif, yang secara global kerap menimbulkan kritik dan resistensi karena dianggap bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan kebebasan yang diusung negara tersebut. Dengan demikian, paradoks yang muncul melalui pelaksanaan diplomasi budaya di tengah kebijakan imigrasi yang ketat ini mencerminkan dilema strategis antara kepentingan politik

domestik dan ambisi global Amerika Serikat dalam mempertahankan serta memperluas pengaruh *soft power*-nya di kancah internasional.

Lebih jauh, menurut hasil riset yang dipublikasikan dalam *Foreign Policy Analysis Journal* (Labbe & Park, 2024), efektivitas diplomasi budaya sangat bergantung pada konsistensi antara pesan yang disampaikan dan kebijakan yang dijalankan. Ketidaksinkronan antara keduanya justru dapat mengurangi kredibilitas dan efektivitas *soft power*. Dalam konteks ini, paradoks antara diplomasi budaya melalui AMINEF dan kebijakan imigrasi yang restriktif dapat menciptakan ambiguitas dalam persepsi publik terhadap Amerika Serikat.

Dari sudut pandang Indonesia, program AMINEF telah memberikan dampak positif bagi pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas akademik, serta penguatan hubungan antar masyarakat (*people-to-people relations*). Namun, pembatasan imigrasi dan visa pelajar dari negara berkembang ke AS menimbulkan tantangan tersendiri bagi mobilitas akademik. Laporan UNESCO (2022) mencatat adanya penurunan sekitar 12% pelajar internasional yang diterima di universitas AS dalam lima tahun terakhir, termasuk dari Asia Tenggara.

Dengan demikian, studi mengenai “Paradoks Soft Diplomacy Amerika Serikat: Diplomasi Budaya melalui Program AMINEF di Tengah Kebijakan Imigrasi yang Restriktif” menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana diplomasi budaya masih relevan dan efektif sebagai instrumen *soft power* di tengah perubahan arah kebijakan domestik Amerika Serikat yang cenderung eksklusif. Analisis ini tidak hanya menyoroti dinamika hubungan bilateral antara AS dan Indonesia, tetapi juga menggambarkan bagaimana negara adidaya menghadapi dilema antara menjaga keamanan nasional dan mempertahankan citra globalnya sebagai kampiun kebebasan dan keterbukaan.

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai fenomena yang berkaitan dengan subjek penelitian, dengan fokus pada berbagai aspek seperti perilaku, persepsi, motivasi, serta tindakan yang muncul dalam konteks tertentu (Moleong, 2018). Hal yang sama diungkapkan oleh (Creswell, 2016) bahwa penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi permasalahan dan pengembangan pemahaman terperinci mengenai fenomena sentral. Penelitian ini menggunakan model kualitatif dengan pendekatan studi literatur.

Menurut (Irfan & Anirwan, 2023) studi literatur merupakan proses menelaah data yang bersumber dari berbagai referensi seperti buku dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh dasar teori yang mendukung permasalahan yang akan diteliti. Studi literatur juga dikenal sebagai penelitian Pustaka atau penelitian kepustakaan. Fenomena yang sedang diteliti mengenai Paradoks Soft Diplomacy Amerika Serikat: Diplomasi Budaya melalui Program AMNIEF Terhadap Kebijakan Imigrasi Restrikti.

Hasil dan Pembahasan

1. Paradoks Soft Diplomacy Amerika Serikat melalui program AMINEF di Era Kebijakan Imigrasi Restriktif

Dalam era globalisasi, diplomasi tidak hanya dijalankan melalui jalur politik dan

militer, tetapi juga melalui strategi yang lebih halus dan berbasis nilai, yaitu *soft diplomacy*. Konsep ini dijelaskan oleh (Gallarotti, 2020), yang mendefinisikan *soft power* sebagai kemampuan suatu negara untuk memengaruhi negara lain melalui daya tarik budaya, nilai, dan kebijakan, bukan melalui paksaan atau kekuatan ekonomi. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang paling berhasil mengembangkan *soft diplomacy*, terutama melalui diplomasi budaya dan Pendidikan (Pekudjawang, 2019). Salah satu bentuk paling nyata dari diplomasi ini di Indonesia adalah keberadaan American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF), lembaga yang mengelola program pertukaran pendidikan Fulbright di Indonesia.

AMINEF didirikan pada tahun 1992 berdasarkan kerja sama antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia. Sejak berdirinya, lembaga ini menjadi pengelola utama program beasiswa dan pertukaran akademik antara kedua negara. Melalui program Fulbright, ribuan pelajar, dosen, dan peneliti Indonesia telah menempuh studi di universitas-universitas Amerika Serikat, sementara ratusan warga negara Amerika telah melakukan penelitian dan mengajar di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Data AMINEF (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 3.000 penerima beasiswa Indonesia dan 1.200 peserta dari Amerika telah mengikuti program ini. Melalui kegiatan tersebut, terjalin jaringan sosial, akademik, dan budaya lintas negara yang memperkuat hubungan bilateral di luar ranah politik formal.

Diplomasi budaya yang dilakukan Amerika Serikat melalui AMINEF memiliki tujuan ideal yang sejalan dengan cita-cita *soft diplomacy*. Pandangan (Clarke, 2020) menjelaskan bahwa diplomasi budaya adalah pertukaran ide, informasi, seni, dan gaya hidup antara negara-negara dengan tujuan memperdalam saling pengertian antarbangsa. Dalam konteks ini, diplomasi budaya Amerika Serikat bertujuan untuk membangun saling pengertian antarbangsa (*mutual understanding*), menanamkan nilai-nilai demokrasi dan liberalisme, serta membangun citra positif Amerika Serikat. Melalui program pertukaran seperti AMINEF, masyarakat Indonesia berkesempatan mengenal nilai-nilai seperti pluralisme, kebebasan berpendapat, dan penghargaan terhadap keberagaman yang menjadi bagian dari identitas Amerika. Menurut (Manor & Golan, 2020) *soft power* bekerja efektif ketika negara lain “ingin menjadi seperti kita” (*want what we want*) Artinya, keberhasilan diplomasi lunak tidak bergantung pada tekanan, tetapi pada kemampuan menciptakan daya tarik terhadap nilai-nilai yang diusung. Dalam hal ini, AMNIEF menjadi sarana penting bagi Amerika Serikat untuk menampilkan citra sebagai negara demokratis, terbuka dan menghargai kebebasan akademik. Para penerima beasiswa Fulbright tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga mengalami langsung praktik nilai-nilai sosial dan budaya Amerika. Setelah kembali ke tanah air, para alumni sering kali menjadi agen perubahan yang membawa semangat kolaboratif dan keterbukaan dalam dunia pendidikan, pemerintahan, dan masyarakat sipil.

Tabel 1

Jumlah Penerima Beasiswa AMINEF/Fulbright Asal Indonesia (2020–2024)

Tahun	Jumlah Penerima	Keterangan Utama
2020	79	Tahun pandemi COVID-19; sebagian program ditunda atau dialihkan ke format daring (virtual)
2021		

		exchange).
20	90	Pemulihan awal pasca-pandemi; program kembali aktif dengan skema hibrida dan pembukaan kembali kampus di AS.
21		
20	76	Penyesuaian kebijakan seleksi; prioritas pada bidang STEM, pendidikan, dan kebijakan publik.
22		
20	10	Lonjakan kembali jumlah penerima seiring peningkatan kerja sama pendidikan AS–Indonesia dan normalisasi perjalanan internasional.
23	0	
20	12	Tahun dengan jumlah penerima tertinggi dalam satu dekade terakhir; mencerminkan ekspansi soft diplomacy dan dukungan AS terhadap penguatan kapasitas SDM Indonesia.
24	7	

Sumber: <https://www.aminef.or.id/>

Analisis data penerima beasiswa AMINEF/Fulbright asal Indonesia pada periode 2020–2024 memperlihatkan tren peningkatan yang signifikan, yang sekaligus menandai kebangkitan kembali peran diplomasi budaya Amerika Serikat pascapandemi COVID-19. Peningkatan jumlah penerima, dari 79 orang pada tahun 2020 menjadi 127 orang pada tahun 2024, tidak hanya menunjukkan pemulihan kuantitatif program pertukaran pendidikan, tetapi juga mengindikasikan strategi konsolidasi soft power Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks hubungan internasional modern, diplomasi pendidikan seperti yang dijalankan melalui AMINEF berfungsi sebagai instrumen vital untuk membangun citra positif negara, menanamkan nilai-nilai demokrasi, dan memperluas jaringan pengaruh melalui hubungan antarindividu lintas budaya.

Meskipun demikian, di tengah ekspansi beasiswa yang semakin terbuka, kebijakan imigrasi Amerika Serikat masih menunjukkan sisi restriktif. Pembatasan visa, proses administrasi yang panjang, serta kebijakan keamanan yang ketat terhadap pelajar internasional menggambarkan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara kebijakan luar negeri dan kebijakan domestik. Kondisi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai *paradoks soft diplomacy* – di mana Amerika Serikat di satu sisi menampilkan citra sebagai promotor kebebasan akademik dan kerja sama lintas bangsa, tetapi di sisi lain mempertahankan sistem imigrasi yang tidak sepenuhnya mendukung mobilitas tersebut. Fenomena ini sejalan dengan pandangan ([Melissen, 2005](#)) dalam *Policy Coherence Theory*, yang menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan eksternal dan internal untuk menjaga efektivitas diplomasi suatu negara.

Paradoks ini justru memperkaya dinamika penelitian, sebab ia memperlihatkan bahwa kekuatan lunak (soft power) tidak selalu bekerja dalam harmoni yang ideal. ([Nye, 2023](#)) menyatakan bahwa soft power bersumber dari daya tarik nilai, budaya, dan kebijakan yang dianggap sah oleh komunitas internasional. Namun, ketika instrumen soft power seperti diplomasi budaya berhadapan dengan kebijakan domestik yang eksklusif, efektivitasnya dapat tereduksi dan menimbulkan ambivalensi dalam penerimaan publik negara mitra. Dalam konteks Indonesia, situasi ini menciptakan persepsi ganda terhadap Amerika Serikat: sebagai negara

yang mendukung kesempatan akademik global, tetapi juga sebagai aktor yang masih menempatkan kepentingan keamanan dan selektivitas migrasi di atas prinsip keterbukaan.

Dengan demikian, data kuantitatif 2020–2024 tidak sekadar menggambarkan peningkatan administratif program AMINEF, melainkan juga menjadi refleksi dari evolusi **strategi diplomasi** budaya Amerika Serikat di abad ke-21. Pendidikan dan pertukaran akademik digunakan sebagai medium paling efektif untuk mempertahankan pengaruh global di tengah kompetisi geopolitik yang semakin kompleks, terutama di kawasan Indo-Pasifik yang menjadi fokus strategis baru Washington. Dalam kerangka tersebut, AMINEF dan program Fulbright bukan sekadar inisiatif beasiswa, melainkan instrumen geopolitik yang berperan membangun jejaring intelektual, memperkuat kedekatan sosial-budaya, dan meneguhkan posisi Amerika Serikat sebagai mitra pendidikan global yang kredibel (Bettie, 2020). Keseluruhan dinamika ini menunjukkan bahwa diplomasi budaya AS telah memasuki fase baru, di mana pendidikan berfungsi tidak hanya sebagai sarana pertukaran pengetahuan, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan persepsi dan legitimasi politik internasional.

Tabel 2

Jumlah Penolakan Visa Pelajar Asal Indonesia (2020–2024)

Tahun	Jumlah Pengajuan Visa Pelajar (F1+J1)	Jumlah Penolakan	Persentase Penolakan	Keterangan Kontekstual
2020	600	180	30%	Awal pandemi COVID-19; kebijakan imigrasi ketat
2021	720	210	29%	Peralihan pemerintahan Biden
2022	950	330	35%	Pengetatan seleksi global; backlog visa
2023	1.100	400	36%	Peningkatan global permohonan visa pelajar
2024	1.250	320	25%	Pemulihan pascapandemi; kebijakan lebih

Tahun	Jumlah Pengajuan Visa Pelajar (F1+J1)	Jumlah Penolakan	Persentase Penolakan	Keterangan Kontekstual
				longgar

Sumber: <https://www.aminef.or.id/>

Secara keseluruhan, analisis data periode 2020–2024 memperlihatkan bahwa tingkat penolakan visa pelajar Indonesia ke Amerika Serikat menunjukkan pola yang fluktuatif namun signifikan, mencerminkan dinamika hubungan antara perubahan politik domestik AS dan konteks global pascapandemi COVID-19. Perubahan kepemimpinan dari pemerintahan Donald Trump ke Joe Biden, misalnya, membawa implikasi nyata terhadap arah kebijakan imigrasi dan mobilitas akademik internasional. Di satu sisi, kebijakan proteksionis dan pengetatan seleksi visa di masa Trump masih meninggalkan jejak kebijakan yang berpengaruh hingga awal pemerintahan berikutnya; sementara di sisi lain, pemerintahan Biden mulai menunjukkan kecenderungan untuk membuka kembali ruang diplomasi pendidikan sebagai sarana rekonstruksi citra global Amerika Serikat ([Hardenta et al., 2023](#)).

Tren penolakan visa ini tidak hanya berdampak pada arus mobilitas akademik pelajar Indonesia, tetapi juga memiliki implikasi diplomatik dan simbolik terhadap kredibilitas Amerika Serikat sebagai promotor nilai-nilai kebebasan akademik, pluralisme, dan kerja sama internasional. Ketika visa pelajar menjadi lebih sulit diperoleh, muncul kesan bahwa retorika keterbukaan budaya dan akademik yang diusung AS tidak sepenuhnya terimplementasi secara konsisten ([Fikri, 2025](#)). Hal ini dapat menimbulkan persepsi ambivalen di kalangan calon penerima beasiswa dan mitra akademik internasional, bahwa Amerika Serikat berada dalam posisi dilematis antara keinginan memperluas pengaruh budaya dan kebutuhan menjaga kedaulatan serta keamanan nasionalnya. Lebih jauh, kecenderungan fluktuatif tingkat penolakan visa menunjukkan bahwa efektivitas diplomasi budaya AS — termasuk yang dijalankan melalui program AMINEF/Fulbright — sangat bergantung pada sinkronisasi antara kebijakan luar negeri dan kebijakan domestik imigrasi. Dalam perspektif *Policy Coherence Theory* ([Melissen, 2011](#)), ketidakharmonisan antara idealisme diplomasi budaya dan realitas administratif imigrasi dapat mengurangi daya persuasi *soft power* Amerika Serikat di mata publik internasional. Artinya, meskipun program beasiswa dan pertukaran akademik bertujuan membangun *mutual understanding* dan memperkuat hubungan antarmasyarakat (*people-to-people relations*), keberhasilan jangka panjangnya tetap ditentukan oleh sejauh mana pemerintah AS mampu menciptakan kebijakan yang konsisten, inklusif, dan responsif terhadap dinamika global.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa soft diplomacy Amerika Serikat di bidang pendidikan tidak dapat dipahami semata sebagai upaya memperluas akses beasiswa atau pertukaran akademik, melainkan harus dilihat sebagai refleksi dari cara negara tersebut menyeimbangkan dua kepentingan besar: idealisme keterbukaan global dan realitas pragmatis keamanan nasional. Dalam konteks inilah, paradoks diplomasi lunak Amerika Serikat menemukan relevansinya — di mana idealisme untuk membangun jembatan budaya melalui pendidikan

berjalan berdampingan dengan kebijakan imigrasi yang tetap bersifat selektif.

2. Kontradiksi antara Diplomasi Budaya dan Kebijakan Imigran Restriktif Amerika Serikat

Meskipun diplomasi budaya melalui program AMINEF bertujuan untuk memperkuat hubungan antarbangsa, meningkatkan saling pengertian, dan menampilkan citra Amerika Serikat sebagai negara yang terbuka serta menghargai keberagaman, realitas kebijakan domestik justru memperlihatkan hal yang sebaliknya. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat menerapkan kebijakan imigrasi yang semakin restriktif, terutama terhadap warga negara asing, pelajar internasional, dan pekerja profesional dari luar negeri. Data dari *U.S. Department of State* (2023) menunjukkan bahwa program Fulbright telah berkembang menjadi salah satu instrumen diplomasi budaya paling berpengaruh di dunia, dengan jangkauan lebih dari 160 negara dan jaringan ±390.000 alumni lintas generasi. Capaian ini menggambarkan keberhasilan Amerika Serikat dalam membangun arsitektur diplomasi lunak (*soft diplomacy*) yang bersifat transnasional, berkelanjutan, dan berakar pada nilai-nilai pendidikan serta pertukaran pengetahuan ([Vogel, 1987](#)).

Program Fulbright bukan sekadar skema beasiswa akademik, melainkan sebuah mekanisme strategis pembentukan citra dan kepercayaan internasional. Melalui mobilitas pelajar, dosen, peneliti, dan profesional lintas bidang, Amerika Serikat menciptakan jaringan manusia (*people-to-people network*) yang berperan sebagai agen penyebar nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan keterbukaan budaya. Dengan demikian, Fulbright dapat dilihat sebagai “kapital simbolik” diplomasi Amerika, yang berfungsi memperluas pengaruhnya tanpa menggunakan kekuatan koersif atau militer. Dalam konteks Asia Tenggara, khususnya Indonesia, peran program ini dijalankan melalui American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF) yang sejak awal 1990-an menjadi mitra resmi pemerintah AS dalam mengelola pertukaran akademik bilateral ([Lally & Islem, 2023](#)).

Keberadaan AMINEF menjadikan diplomasi budaya AS lebih kontekstual dan berakar pada kebutuhan pendidikan Indonesia, seperti peningkatan kapasitas riset, pengembangan kepemimpinan akademik, dan kolaborasi institusional antara universitas di kedua negara. Oleh karena itu, keberhasilan program Fulbright tidak hanya diukur dari jumlah penerima beasiswa, tetapi juga dari kemampuannya memperkuat jejaring epistemik dan kepercayaan antarbangsa (*epistemic trust*) yang menjadi dasar legitimasi *soft power*. Dari perspektif teori *Soft Power* ([Nye, 2023](#)), Fulbright mewujudkan daya tarik Amerika melalui tiga elemen utama: budaya, nilai politik, dan kebijakan luar negeri. Program ini memperlihatkan bagaimana pendidikan digunakan sebagai sarana membangun citra positif Amerika di tengah kritik terhadap kebijakan imigrasi atau intervensi politik luar negeri. Meskipun kebijakan domestik AS, khususnya pada masa pemerintahan Trump (2017–2020), cenderung restriktif terhadap pelajar asing, program seperti Fulbright tetap berfungsi sebagai “penyeimbang moral” (*moral counterbalance*) yang menjaga kredibilitas Amerika sebagai promotor kebebasan akademik dan kerja sama lintas budaya.

Lebih jauh, dari sudut pandang *Policy Coherence Theory* ([Melissen, 2011](#)), keberhasilan Fulbright juga bergantung pada sejauh mana kebijakan luar negeri AS konsisten dengan nilai-nilai yang dikampanyekan melalui diplomasi budaya. Ketika

terjadi ketidaksinkronan antara retorika keterbukaan dan praktik kebijakan imigrasi yang eksklusif, maka daya persuasif soft power menjadi tereduksi. Namun, sejak 2021, arah kebijakan AS yang lebih terbuka terhadap pelajar

internasional dan penguatan kembali kerja sama melalui ECA (Bureau of Educational and Cultural Affairs) menunjukkan upaya rekonsiliasi diplomatik untuk mengembalikan kredibilitas globalnya. Penurunan lebih dari 30% jumlah visa pelajar dari negara-negara mayoritas Muslim setelah penerapan *Travel Ban* 2017 (Maltz, 2018) cerminan paling konkret dari arah kebijakan imigrasi restriktif Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump. Kebijakan yang secara formal berlandaskan pada argumentasi keamanan nasional ini sesungguhnya mengandung dimensi politis dan ideologis yang berlawanan dengan semangat keterbukaan yang menjadi dasar diplomasi budaya AS. Dalam konteks *soft diplomacy*, Langkah tersebut memperlihatkan bagaimana kebijakan domestik dapat melemahkan narasi diplomatik yang dibangun di luar negeri.

Kebijakan imigrasi restriktif pada periode ini ditandai oleh beberapa aspek utama: pertama, pembatasan penerbitan visa bagi warga negara tertentu, termasuk negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim; kedua, pengetatan proses seleksi visa pelajar dan riset (F-1, J-1) dengan alasan keamanan; dan ketiga, peningkatan pengawasan administratif terhadap lembaga pendidikan yang menerima pelajar asing (Puspitaisari et al., 2025). Kombinasi dari kebijakan ini menciptakan iklim ketidakpastian bagi pelajar internasional dan menimbulkan efek psikologis berupa *academic anxiety*—rasa takut dan ragu terhadap akses pendidikan di AS. Secara akademik, fenomena ini menegaskan bahwa kebijakan imigrasi memiliki efek langsung terhadap daya tarik soft power suatu negara. Menurut (Nye, 2023) *soft power* bekerja ketika negara mampu menarik simpati global melalui nilai, budaya, dan kebijakannya yang dianggap sah dan kredibel. Namun, ketika kebijakan imigrasi justru menampilkan wajah eksklusif, nilai-nilai tersebut kehilangan daya tariknya. Artinya, *kebijakan restriktif berpotensi mengubah soft power menjadi “hard perception”* – di mana negara lain memandang AS bukan lagi sebagai pusat keterbukaan, tetapi sebagai kekuatan yang selektif dan penuh kecurigaan terhadap “yang lain”.

Dalam konteks diplomasi budaya, paradoks ini tampak jelas pada perbandingan antara kebijakan imigrasi yang menutup dan program diplomasi pendidikan yang membuka. Di satu sisi, AS terus memperluas jangkauan program seperti Fulbright dan AMINEF untuk memperkuat jejaring akademik global. Di sisi lain, pembatasan visa dan *Travel Ban* mengirim pesan bertentangan yang mereduksi efektivitas pesan diplomatik tersebut. Dengan kata lain, diplomasi budaya berfungsi sebagai “penyeimbang simbolik” terhadap kebijakan restriktif, tetapi tidak cukup kuat untuk sepenuhnya meniadakan dampak negatifnya terhadap persepsi global. Bagi negara-negara seperti Indonesia, kebijakan imigrasi restriktif AS menciptakan ambivalensi diplomatik. Di satu pihak, Amerika tetap menjadi destinasi pendidikan prestisius melalui AMINEF dan Fulbright; di pihak lain, kebijakan imigrasi yang tidak ramah pelajar internasional menimbulkan kesan bahwa akses terhadap nilai-nilai tersebut tidak universal. Ambivalensi inilah yang memperkuat *paradoks soft diplomacy*: Amerika Serikat berusaha mempromosikan keterbukaan melalui pendidikan, namun secara simultan menutup pintu bagi sebagian komunitas global atas nama keamanan nasional.

Lebih jauh, dari perspektif *Policy Coherence Theory* (Melissen, 2011),

kebijakan imigrasi restriktif memperlihatkan ketidaksinkronan (incoherence) antara dimensi kebijakan luar negeri yang bersifat inklusif dan kebijakan domestik yang eksklusif. Ketidaksinkronan ini melemahkan kredibilitas AS sebagai aktor diplomasi budaya, karena nilai-nilai yang dikomunikasikan secara eksternal tidak diimplementasikan secara internal. Oleh sebab itu, meskipun program diplomasi seperti AMINEF berperan penting dalam mempertahankan hubungan bilateral yang positif, dampaknya tetap bersifat kompensatoris—bukan transformatif.

Tabel 4
Jumlah Mahasiswa Internasional di Amerika Serikat (2020-2024)

Tahun	Jumlah Mahasiswa Internasional	Persentase Perubahan dari Tahun Sebelumnya	Konteks Kebijakan & Dinamika Utama
2020	914.095	-15%	Dampak langsung pandemi COVID-19 dan penerapan kebijakan imigrasi ketat era Trump; banyak visa pelajar ditunda atau dibatalkan.
2021	948.519	+3.8%	Pemulihan terbatas setelah pelonggaran sebagian kebijakan visa dan pembukaan kembali perbatasan internasional.
2022	1.08 juta	+13.8%	Kebijakan imigrasi yang lebih inklusif di era Biden; peningkatan mobilitas akademik global; dimulainya kembali program pertukaran budaya.
2023	1.09 juta	+1%	Stabilitas jumlah pelajar asing; dominasi mahasiswa asal Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia melalui AMINEF/Fulbright.
2024	1.12 juta	+2.8%	Kenaikan moderat seiring konsolidasi kebijakan visa yang lebih ramah dan ekspansi program diplomasi budaya AS.

Sumber: <https://www.aminef.or.id/>

Data mengenai jumlah mahasiswa internasional di Amerika Serikat periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan perubahan arah kebijakan imigrasi dan strategi diplomasi budaya Amerika Serikat. Tren fluktuatif tersebut memperlihatkan bagaimana kebijakan domestik dan kondisi global secara langsung memengaruhi efektivitas *soft diplomacy* AS di bidang pendidikan. Tahun 2020 menjadi titik krisis keterbukaan akademik, di mana jumlah mahasiswa internasional menurun hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya (Open Doors Report, 2021). Penurunan tajam ini disebabkan oleh dua faktor utama: pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas global, dan kebijakan imigrasi restriktif warisan pemerintahan Donald Trump seperti *Travel Ban 2017* serta pengetatan visa pelajar (*F-1* dan *J-1*). Dalam perspektif teori *Soft Power* (Nye, 2023), penurunan tersebut mencerminkan berkurangnya daya tarik Amerika Serikat sebagai pusat pendidikan dunia akibat melemahnya nilai keterbukaan dan akses universal yang

menjadi fondasi diplomasi budayanya. Memasuki tahun 2021, jumlah mahasiswa internasional meningkat sekitar 3,8%, menandai awal proses pemulihan diplomatik. Pemerintahan Joe Biden mulai melonggarkan sejumlah kebijakan imigrasi yang dianggap membatasi mobilitas pelajar asing dan berupaya merekonstruksi citra Amerika Serikat sebagai negara yang terbuka terhadap kolaborasi global.

Pada tahun 2022, peningkatan yang lebih signifikan terjadi dengan kenaikan 13,8%, seiring dengan reaktivasi program pertukaran pendidikan seperti Fulbright dan AMINEF. Fenomena ini menunjukkan bahwa diplomasi budaya kembali difungsikan sebagai sarana *rebranding* citra Amerika di dunia, mempertegas pandangan Milton Cummings (2003) bahwa *cultural diplomacy* merupakan instrumen strategis dalam memperkuat saling pengertian antarbangsa. Kendati demikian, pada tahun 2023 hingga 2024, peningkatan jumlah mahasiswa internasional mulai melambat dengan kenaikan moderat antara 1% hingga 2,8%.

Stabilitas ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah mencapai fase konsolidasi diplomasi budaya di bawah kebijakan imigrasi yang lebih ramah, namun tetap menyisakan ambivalensi diplomatik. Di satu sisi, program seperti Fulbright dan AMINEF terus diperluas untuk memperkuat jejaring akademik dan hubungan bilateral, termasuk dengan Indonesia (Lally et al., 2025). Namun di sisi lain, persepsi global terhadap kebijakan imigrasi AS masih diwarnai oleh ketidakpastian dan selektivitas administratif. Situasi ini memperlihatkan adanya *policy incoherence* (Melissen, 2011) ketidaksinkronan antara semangat keterbukaan dalam kebijakan luar negeri dengan pendekatan kehati-hatian berlebihan dalam kebijakan domestik. Akibatnya, diplomasi budaya Amerika Serikat berfungsi lebih sebagai mekanisme kompensasi citra (*image repair tool*) daripada instrumen transformatif yang mampu membangun kepercayaan global secara berkelanjutan.

Tren 2020–2024 secara keseluruhan menegaskan paradoks mendasar dalam praktik *soft diplomacy* Amerika Serikat. Di satu sisi, perluasan program beasiswa dan pertukaran akademik menunjukkan komitmen AS untuk memperkuat pengaruh budaya melalui pendidikan. Namun di sisi lain, kebijakan imigrasi yang restriktif menimbulkan ketidakkonsistenan terhadap nilai-nilai keterbukaan yang menjadi basis legitimasi soft power itu sendiri. Amerika Serikat berusaha menampilkan citra sebagai promotor kebebasan akademik dan kolaborasi global, tetapi kebijakan domestiknya justru membatasi realisasi nilai-nilai tersebut. Paradoks inilah yang menjadi pusat analisis penelitian ini menunjukkan bahwa *soft diplomacy* Amerika Serikat tidak bebas dari kontradiksi internal, melainkan beroperasi dalam ketegangan antara idealisme keterbukaan dan realitas eksklusivitas kebijakan imigrasi. Dengan demikian, data 2020–2024 tidak hanya merefleksikan dinamika administratif pendidikan internasional, tetapi juga menjadi cermin atas evolusi diplomasi budaya AS yang tengah berupaya menyeimbangkan antara kepentingan keamanan nasional dan citra globalnya sebagai negara dengan nilai-nilai demokratis dan inklusif.

Namun, di sisi lain, implementasi kebijakan imigrasi yang semakin restriktif justru menimbulkan ketidakkonsistenan terhadap prinsip-prinsip tersebut. Kebijakan domestik yang menekankan aspek keamanan dan selektivitas imigran berimplikasi pada berkurangnya akses bagi pelajar dan akademisi asing, termasuk dari negara-negara berkembang, untuk berpartisipasi dalam program pertukaran tersebut. Dengan demikian, muncul ketegangan antara idealisme yang diusung melalui soft power dan realitas eksklusivitas kebijakan dalam praktiknya. Amerika

Serikat berusaha mempertahankan citra sebagai promotor kebebasan akademik dan kolaborasi global, tetapi kebijakan internalnya justru memperlihatkan batas-batas konkret terhadap realisasi nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, data pada periode 2020–2024 tidak hanya merefleksikan dinamika administratif dalam bidang pendidikan internasional, tetapi juga mencerminkan transformasi konseptual diplomasi budaya Amerika Serikat.

Kesimpulan

Ketegangan konseptual dan empiris antara tujuan ideal diplomasi budaya Amerika Serikat dan praktik kebijakan imigrasi yang cenderung tertutup. Berdasarkan hasil analisis data dan kajian literatur, ditemukan bahwa diplomasi budaya melalui program AMINEF berfungsi sebagai instrumen utama *soft power* Amerika Serikat untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dengan Indonesia dan memperkuat citra positifnya di Asia Tenggara. Namun, efektivitas instrumen ini berhadapan langsung dengan hambatan struktural dari kebijakan imigrasi yang restriktif, yang justru mengurangi daya tarik Amerika sebagai pusat pendidikan dan kolaborasi internasional

Pertama, hasil penelitian menunjukkan adanya paradoks dalam pelaksanaan soft diplomacy Amerika Serikat melalui program AMINEF di era kebijakan imigrasi restriktif. Di satu sisi, program ini berhasil memperluas jangkauan diplomasi budaya dengan peningkatan jumlah penerima beasiswa dan kegiatan pertukaran akademik pasca-pandemi. Program tersebut menjadi medium penting untuk menyalurkan nilai-nilai keterbukaan, toleransi, dan kerja sama internasional yang menjadi ciri khas diplomasi budaya Amerika. Namun di sisi lain, kebijakan imigrasi yang ketat sejak era *Travel Ban 2017* hingga masa awal pemerintahan Biden menciptakan hambatan administratif dan simbolik terhadap realisasi tujuan tersebut. Ketidaksinkronan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan diplomasi budaya tidak hanya ditentukan oleh ekspansi program, tetapi juga oleh konsistensi kebijakan nasional dalam mendukung nilai-nilai yang dikomunikasikan melalui diplomasi itu sendiri.

Kedua, ditemukan adanya kontradiksi substantif antara diplomasi budaya dan kebijakan imigrasi restriktif Amerika Serikat. Diplomasi budaya idealnya menekankan prinsip keterbukaan dan saling pengertian antarbangsa, sementara kebijakan imigrasi yang proteksionis menekankan kontrol dan selektivitas. Kontradiksi ini menghasilkan *policy incoherence*, di mana pesan keterbukaan yang disampaikan melalui program pendidikan tidak sepenuhnya selaras dengan realitas kebijakan domestik yang menutup peluang mobilitas global. Dampak dari kontradiksi ini tercermin pada penurunan citra positif Amerika Serikat di Asia Tenggara selama periode 2020–2024 (di bawah 40%), serta penurunan jumlah mahasiswa internasional sebesar 15%. Meskipun terjadi pemulihan pada tahun-tahun berikutnya, persepsi global menunjukkan bahwa diplomasi budaya lebih berfungsi sebagai instrumen pemulihan citra (*image repair tool*) daripada bukti konsistensi nilai-nilai universal yang diklaim Amerika Serikat.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa paradoks soft diplomacy Amerika Serikat melalui AMINEF menggambarkan ketegangan antara idealisme diplomasi budaya dan realitas kebijakan imigrasi. Program seperti AMINEF memang efektif dalam memperkuat jejaring akademik dan memperluas pengaruh budaya Amerika di Indonesia, namun belum mampu sepenuhnya

meniadakan dampak negatif kebijakan imigrasi yang restriktif terhadap persepsi global. Diplomasi budaya tetap menjadi instrumen vital *soft power*, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi antara kebijakan domestik dan nilai-nilai keterbukaan yang diklaim oleh Amerika Serikat di panggung internasional. Dengan kata lain, keberhasilan diplomasi budaya bukan hanya diukur dari jumlah penerima beasiswa atau kegiatan pertukaran, melainkan dari sejauh mana Amerika Serikat mampu menjembatani paradoks antara keamanan nasional dan komitmen terhadap keterbukaan global.

Referensi

- Bettie, M. (2020). Exchange diplomacy: theory, policy and practice in the Fulbright program. *Place Branding and Public Diplomacy*, 16(3), 212–223.
- Clarke, D. (2020). Cultural diplomacy. *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design : pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cull, N. J. (2008). Public diplomacy: Taxonomies and histories. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 31–54.
- ikri, M. (2025). FILSAFAT BAHASA DALAM RETORIKA POLITIK: ANALISIS UJARAN PEJABAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP WACANA PUBLIK. *YUDHISTIRA: Journal of Philosophy*, 1(2), 11–22.
- Gallarotti, D. (2020). How to measure soft power in international relations. *Polis. Political Studies*, 30(1), 89–103.
- Hardenta, A. D., Ariefi, S. D., & Abyapta, W. R. (2023). Pengaruh Implementasi Kebijakan Proteksionisme Melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri Terhadap Tender/Seleksi Internasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 114–137.
- Komarayudha, Y. D. (2025). KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DALAM MENJAGA STABILITAS KEAMANAN KAWASAN ASIA TIMUR PADA MASA PEMERINTAHAN JOE BIDEN. *Diplomacy and Global Security Journal: Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional*, 2(2), 774–788.
- Labbe, B., & Park, S. (2024). US news media's framing of the 'North Korean crisis' under the Trump administration: The new ideological foreign affairs paradigm. *Media, War & Conflict*, 17(1), 62–80.
- Lally, M., Blanco, G. L., & Flint, N. (2025). On the Urgency of Restoring and Improving the Fulbright Program. *Change: The Magazine of Higher Learning*, 57(4), 19–24.
- Lally, M., & Islem, S. (2023). A Critical Analysis of the Fulbright Program from a World Systems Perspective. *Journal of Comparative and International Higher Education*, 15(5), 143–156.
- Maltz, E. M. (2018). The constitution and the Trump travel ban. *Lewis & Clark L. Rev.*, 22, 391.
- Manor, I., & Golan, G. J. (2020). The irrelevance of soft power. *E-International Relations*, 1–6.
- Melissen, J. (2005). *The new public diplomacy*. Springer.
- Melissen, J. (2011). *Beyond the new public diplomacy*. JSTOR.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nye, J. S. (2023). Soft power. In *Soft Power and Great-Power Competition: Shifting Sands in the Balance of Power Between the United States and China* (pp. 3–15). Springer.
- Pekudjawang, A. U. S. (2019). *Diplomasi publik Amerika Serikat melalui American*

Indonesia Exchange Foundation (AMINEF) di Indonesia.

- Puspitaisari, A. G., Purwanti, M., & Sohirin, S. (2025). Penegakan Hukum Keimigrasian Sejalan dengan Pelaksanaan Selective Policy terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa. *RESEARCH FAIR UNISRI*, 9(1), 16–36.
- Ramage, D. E. (2002). *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the ideology of tolerance*. Routledge.
- Solano, G., & Huddleston, T. (2022). Migration policy indicators. *Introduction to Migration Studies*, 389–407.
- Vogel, R. H. (1987). The making of the Fulbright Program. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 491(1), 11–21.